



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI X DPR RI  
(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,  
PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, RISTEK DIKTI, DAN PERPUSNAS)**

---

Tahun Sidang	: 2015 - 2016.
Masa Persidangan ke-	: IV (empat).
Sifat Rapat	: Terbuka.
Jenis Rapat	: Rapat Kerja.
Dengan	: <b>Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.</b>
Hari/Tanggal	: <b>Senin, 11 April 2016.</b>
Pukul	: <b>15.00 WIB s/d selesai.</b>
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI
Pimpinan Rapat	: Teuku Riefky Harsya, M.T/Ketua Komisi X DPR RI.
Sekretaris Rapat	: Sarilan Putri Kh, S.sos/Kabagset.Komisi X DPR RI.
Acara	: <b>1. Realisasi pelaksanaan APBN tahun 2016 per 31 Maret 2016;</b> <b>2. Persiapan pembahasan RAPBN Perubahan tahun 2016;</b> <b>3. Laporan pelaksanaan Ujian Nasional tahun 2016; dan</b> <b>4. Pelaksanaan Kurikulum 2013; dan</b> <b>5. Lain-lain</b>
Hadir	: 34 orang dari 54 Anggota Komisi X DPR RI.
Hadir Pemerintah	: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI beserta jajarannya.

**I. PENDAHULUAN.**

Rapat Kerja Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 15.25 WIB oleh Teuku Riefky Harsya, M.T/Ketua Komisi X DPR RI, setelah kuorum tercapai dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI serta menampung pertanyaan, saran dari Anggota Komisi X DPR RI.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN.

### A. Realisasi pelaksanaan APBN tahun 2016 per 31 Maret 2016

1. Komisi X DPR RI mengharapkan target dan realisasi pelaksanaan APBN Tahun 2016 yang per 31 Maret 2016 baru tercapai 6.30%, untuk dapat mencapai realisasi 19.01% pada akhir April 2016, yang diantaranya dengan mempercepat realisasi penerimaan PIP oleh siswa penerima.
2. Dalam rangka mencapai target dan realisasi APBN Tahun 2016, Komisi X DPR RI mendorong agar Program dan Kegiatan harus sesuai dengan Renstra yang telah disusun oleh Kemendikbud RI dengan tetap meningkatkan monitoring dan evaluasi serta menyampaikan laporan secara terinci sampai dengan sub kegiatan sebagai bahan kajian Komisi X DPR RI khususnya dalam bidang pengawasan paling lambat tanggal 15 April 2016.

### B. Persiapan pembahasan RAPBN Perubahan tahun 2016.

Terkait adanya informasi akan dikurangnya alokasi anggaran Kemendikbud RI pada RAPBN-P Tahun Anggaran 2016, Komisi X DPR RI mendesak Mendikbud RI untuk:

- a. menyampaikan alokasi anggaran pendidikan dalam belanja K/L Pemerintah Pusat TA 2015 dan TA 2016 selambat-lambatnya akhir April 2016.
- b. mengambil langkah-langkah sesuai ketentuan perundang-undangan agar pengurangan alokasi anggaran dalam RAPBN-P Tahun Anggaran 2016 tersebut diutamakan dari K/L lain yang melaksanakan anggaran fungsi pendidikan.
- c. mengupayakan alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan (Pusat dan Daerah) harus tetap diatas atau sama dengan 20% dari Belanja Negara dan Belanja Daerah.

### C. Laporan Pelaksanaan Ujian Nasional tahun 2016.

1. Komisi X DPR RI mengapresiasi Kemendikbud RI yang telah melaksanakan Ujian Nasional Tahun 2016 untuk tingkat SMA dan sederajat yang berjalan dengan baik.
2. Terhadap pelaksanaan Ujian Nasional Tahun 2016, Komisi X DPR RI mendesak Kemendikbud RI untuk:
  - a. meningkatkan sosialisasi yang intensif terkait kriteria dan kesiapan satuan pendidikan (sekolah) dari sisi infrastruktur, sarana prasarana, SDM, dan peserta dalam menyelenggarakan UNBK, sehingga sekolah tidak memaksakan untuk melaksanakan UNBK.
  - b. meningkatkan dan memastikan satuan pendidikan yang telah ditetapkan sebagai penyelenggara UNBK tidak terkendala jaringan internet dan kesiapan sumber energi listrik.
  - c. Menindaklanjuti setiap informasi kebocoran soal UN untuk memperbaiki sistem pelaksanaan UN di masa yang akan datang.

3. Komisi X DPR RI mendesak Kemendikbud RI untuk meningkatkan sosialisasi dan koordinasi dengan satuan pendidikan agar menyediakan soal-soal Ujian Nasional bagi siswa penyandang disabilitas (tuna netra) dalam bentuk huruf *braille* sehingga dalam pelaksanaan UN setiap siswa terpenuhi haknya.

#### **D. Kurikulum 2013.**

1. Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Kurikulum 2013, Komisi X DPR RI memberikan catatan sebagai berikut:
  - a. perlu peningkatan pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan mengingat belum semua SDM (guru, kepala sekolah, dan pengawas) memiliki kompetensi dan pemahaman yang baik dalam melaksanakan K-13.
  - b. mengusahakan ketersediaan sarana dan prasarana yang ada di sekolah pelaksana K-13 sesuai standar nasional pendidikan (SNP).
  - c. mengusahakan ketersediaan buku siswa dan buku guru yang sesuai dengan standar nasional pendidikan (SNP).
  - d. mengusahakan pendidikan Pancasila dan budi pekerti dapat dilaksanakan dengan baik.
2. Komisi X DPR RI mendesak Kemendikbud RI untuk segera merealisasikan Kebaruan Pelatihan Kurikulum yang meliputi:
  - a. Materi pelatihan 70% praktik, 30% teori;
  - b. Pendekatan pelatihan berbasis aktivitas;
  - c. Format pelatihan bersifat interaktif dan fasilitatif;
  - d. Pelatihan sekaligus berfungsi sebagai proses *assesment*.

#### **E. Lain-lain.**

1. Dalam rangka mewujudkan pendidikan PAUD yang berkualitas, Komisi X DPR RI mendesak Kemendikbud RI untuk melakukan pendataan dan menyusun kebijakan terkait kriteria dan kompetensi Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) untuk selanjutnya diimplementasikan kepada seluruh PAUD di Indonesia.
2. Terkait dengan pencairan PIP, Komisi X DPR RI mendesak Kemendikbud RI untuk melakukan evaluasi dan koordinasi dengan bank penyalur dan semua pihak terkait agar pencairan dana PIP bisa dipercepat penyalurannya kepada penerima PIP.
3. Komisi X DPR RI mendesak Kemendikbud RI untuk selalu memperbaharui Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Tahun 2015 dan hasil perbaikan Dapodik tersebut digunakan untuk merealisasikan PIP Tahun 2016.

4. Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbud RI untuk melengkapi buku teks, buku pengayaan, dan buku-buku ibadah yang diperlukan anak-anak berkebutuhan khusus.
5. Kemendikbud RI menyampaikan neraca pendidikan nasional kepada Komisi X DPR RI selambat-lambatnya akhir bulan Mei 2016.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 18.40 WIB

MENDIKBUD RI,



ANIES BASWEDAN

KETUA RAPAT,



TEUKU RIEFKY HARSYA